



GOVERNANCE LOKAL DALAM PEMBINAAN KOPERASI EVALUASI ADMINISTRASI PUBLIK TERHADAP PERMENKOP UKM NO. 9/2018

Abdul Kholik¹, Umedi²

Universitas Setiabudhi Rangkasbitung, Banten, Indonesia^{1,2}
kholik186911@gmail.com^{1*}, umediuemedi103@gmail.com²

Riwayat Artikel

Diterima

Maret 2025

Revisi

April 2025

Terbit

Mei 2025

Keywords:

Cooperative Development;
Public Policy; Local
Governance.

ABSTRACT

This study evaluates the implementation of Ministerial Regulation No. 9/2018 on cooperative development in Lebak Regency, focusing on the role of local government in strengthening cooperatives and identifying obstacles in policy implementation. The research shows that while the policy has yielded positive results for some cooperatives, its impact is uneven due to limited resources, personnel, and coordination between central and local governments. The study highlights the need for better adaptation of policies to local conditions and stronger collaboration among related institutions. The findings contribute to the literature on public policy and cooperative governance by emphasizing the importance of local-specific policy adaptation and multi-level governance in cooperative development. Further research is needed to explore how these policy adaptations can enhance the effectiveness of cooperative development in diverse regions.

Korespondensi:

kholik186911@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini mengevaluasi implementasi Peraturan Menteri No. 9/2018 mengenai pembinaan koperasi di Kabupaten Lebak, dengan fokus pada peran pemerintah daerah dalam penguatan koperasi dan mengidentifikasi hambatan dalam implementasi kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kebijakan ini memberikan hasil positif bagi sebagian koperasi, dampaknya tidak merata akibat keterbatasan sumber daya, personel, dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Penelitian ini menyoroti perlunya penyesuaian kebijakan yang lebih sesuai dengan kondisi lokal dan peningkatan kolaborasi antara lembaga terkait. Temuan ini memberikan kontribusi pada literatur kebijakan publik dan tata kelola koperasi dengan menekankan pentingnya adaptasi kebijakan berbasis kebutuhan lokal dan *multi-level governance* dalam pengembangan koperasi. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi bagaimana adaptasi kebijakan ini dapat meningkatkan efektivitas pengembangan koperasi di berbagai daerah.

©2025 Power: Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik

How to cite (in APA Style): Kholik, A., & Umedi. (2025). Governance lokal dalam pembinaan koperasi: Evaluasi administrasi publik terhadap Permenkop UKM No. 9/2018. *Power: Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, 1(1), 1–10.



PENDAHULUAN

Koperasi telah lama menjadi bagian integral dari perekonomian Indonesia, berperan dalam memperkuat ekonomi rakyat, mengurangi ketimpangan, dan menciptakan peluang usaha. Menurut Kementerian Koperasi dan UKM (2018), koperasi adalah badan usaha yang memiliki prinsip demokrasi ekonomi, dengan anggota yang berperan aktif dalam pengambilan keputusan serta pengelolaan usaha. Keberadaannya diharapkan dapat memberikan kesejahteraan bagi anggotanya dan masyarakat secara umum, khususnya dalam upaya pemberdayaan ekonomi lokal. Salah satu instrumen yang dirancang untuk mengoptimalkan pembinaan koperasi adalah Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 9/2018. Permenkop ini mengatur berbagai hal terkait tata kelola koperasi, mulai dari penyelenggaraan hingga pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Pembinaan koperasi oleh pemerintah daerah sangat penting karena dapat meningkatkan kapasitas kelembagaan, manajerial, dan finansial koperasi sehingga dapat beroperasi secara lebih efektif dan mandiri. Hasilnya, koperasi tidak hanya berfungsi sebagai entitas bisnis, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan ekonomi lokal (Lamsal, 2017; Habibie et al., 2019).

Namun demikian, meskipun kebijakan ini memberikan harapan besar bagi pemberdayaan koperasi, implementasinya di lapangan masih menghadapi sejumlah tantangan. Sebagian besar penelitian menyatakan bahwa meskipun kebijakan tersebut sudah diatur dengan baik, implementasinya di tingkat daerah sering kali terkendala oleh faktor birokrasi, ketidaksesuaian antara regulasi dan kebutuhan lokal, serta kurangnya koordinasi antar lembaga pemerintah yang menangani koperasi (Chavez et al., 2020; Melendez & Hernandez, 2018). Penelitian oleh Purnomo dan Hadi (2020) menunjukkan bahwa salah satu hambatan terbesar dalam implementasi kebijakan

pembinaan koperasi adalah kurangnya pemahaman pemerintah daerah mengenai prinsip koperasi dan karakteristik operasionalnya. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam pengalokasian dana yang tepat dan pelaksanaan program pembinaan yang sesuai dengan kondisi koperasi di daerah tersebut. Lebih lanjut, meskipun ada berbagai pelatihan untuk pengurus koperasi, kualitas pelatihan tersebut sering kali tidak memenuhi kebutuhan spesifik koperasi di daerah (Winardi, 2019). Di samping itu, banyak koperasi yang belum sepenuhnya memahami pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola yang baik, sehingga keberlanjutan koperasi sering kali terganggu. Berbagai kendala ini mengindikasikan bahwa kebijakan Permenkop 9/2018 masih memerlukan penyesuaian untuk bisa diterapkan dengan efektif di tingkat daerah.

Dengan mengidentifikasi tantangan-tantangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menawarkan solusi dan kebaruan dalam pendekatan pembinaan koperasi melalui implementasi kebijakan yang lebih kontekstual dan berbasis pada penguatan kapasitas pemerintah daerah. Salah satu aspek kebaruan yang ditawarkan oleh penelitian ini adalah analisis terhadap sinergi antara kebijakan pusat dan pemerintahan daerah dalam pembinaan koperasi, dengan mengkaji lebih dalam pengaruh koordinasi antar lembaga pemerintah dalam konteks implementasi kebijakan Permenkop 9/2018. Dalam penelitian sebelumnya, banyak yang lebih menekankan pada kelembagaan koperasi itu sendiri dan mekanisme internal koperasi dalam meningkatkan kinerjanya (Mulyani & Mardiana, 2020). Penelitian ini akan lebih mendalami bagaimana tata kelola koperasi dapat didorong melalui kebijakan lokal yang berbasis pada evaluasi kebijakan dan kondisi aktual di lapangan. Penelitian oleh Zaman et al. (2020) dan Adnan (2021) menyoroti pentingnya

keterlibatan pemerintah daerah dalam mendukung keberlanjutan koperasi, terutama dalam hal fasilitasi pembiayaan, pelatihan, dan penyusunan program yang sesuai dengan karakteristik lokal (Zaman et al., 2020; Adnan, 2021). Kebaruan lain dari artikel ini adalah penekanan pada penggunaan pendekatan multi-level governance yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta koperasi itu sendiri dalam merumuskan kebijakan yang lebih inklusif dan efektif. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi penting dalam perumusan kebijakan yang lebih terintegrasi antara tingkat pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung koperasi.

Selain kebaruan dalam pendekatan kebijakan, artikel ini juga akan membahas literatur terkini yang relevan dengan implementasi kebijakan publik dalam konteks koperasi, baik di Indonesia maupun di negara-negara berkembang lainnya. Penelitian oleh Djawad (2019) dan Rizal (2020) menunjukkan bahwa tantangan terbesar dalam pengembangan koperasi di negara berkembang adalah terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki kemampuan manajerial untuk menjalankan koperasi dengan efisien (Djawad, 2019; Rizal, 2020). Di samping itu, studi oleh Gunarwan et al. (2021) menekankan pentingnya peningkatan kapasitas kelembagaan koperasi melalui peningkatan pelatihan dan pembinaan yang lebih spesifik (Gunarwan et al., 2021). Tren global juga menunjukkan bahwa koperasi yang dapat bertahan dalam ekonomi yang kompetitif adalah koperasi yang menerapkan manajemen yang berbasis pada prinsip-prinsip *good governance*, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi (Basir et al., 2021; Amin & Zain, 2020). Di Indonesia, kebijakan terbaru yang diatur dalam Permenkop 9/2018 seharusnya menjadi landasan untuk menciptakan koperasi yang berkelanjutan dan mampu beradaptasi dengan perubahan kebutuhan pasar, namun

perlu ada evaluasi mendalam mengenai bagaimana kebijakan ini diimplementasikan di daerah-daerah dengan berbagai karakteristik yang berbeda.

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi penting dalam memahami dinamika pembinaan koperasi melalui kebijakan publik di tingkat lokal. Dengan mengevaluasi implementasi Permenkop 9/2018, artikel ini akan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai tantangan dan peluang yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam mendukung koperasi. Lebih jauh lagi, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan pembinaan koperasi dengan lebih memperhatikan aspek-aspek lokal, kebutuhan spesifik koperasi, dan peran penting dari penguatan kapasitas pemerintah daerah. Sebagai langkah selanjutnya, diharapkan ada pengembangan kebijakan berbasis data yang lebih menyeluruh untuk meningkatkan keberhasilan implementasi kebijakan tersebut.

KAJIAN PUSTAKA

Koperasi di Indonesia memiliki peran penting dalam pemberdayaan ekonomi lokal dan pemerataan kesejahteraan. Menurut Lamsal (2017), koperasi merupakan salah satu model ekonomi yang memfasilitasi distribusi kekayaan secara lebih merata dengan mengutamakan prinsip demokrasi dalam pengelolaannya. Koperasi memungkinkan anggota untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan ekonomi mereka. Habibie et al. (2019) menekankan bahwa koperasi di Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai entitas bisnis, tetapi juga sebagai alat untuk menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kesenjangan ekonomi antar masyarakat. Dalam konteks pemberdayaan ekonomi lokal, koperasi berperan sebagai motor penggerak untuk memperkuat ekonomi daerah dengan menyediakan

akses yang lebih baik terhadap modal dan pasar bagi anggotanya (Djawan et al., 2021). Oleh karena itu, pengelolaan koperasi yang baik sangat penting untuk memastikan bahwa koperasi dapat berfungsi dengan maksimal dalam mencapai tujuan ekonomi inklusif.

Peran pemerintah dalam pembinaan koperasi sangat krusial, terutama dalam konteks kebijakan publik yang mengarah pada pemberdayaan ekonomi lokal. Salah satu kebijakan yang diatur oleh pemerintah Indonesia adalah Permenkop UKM No. 9/2018, yang berfokus pada penguatan kapasitas kelembagaan koperasi dan pengembangan usaha koperasi di berbagai daerah. Seperti yang dijelaskan oleh Basir et al. (2021), kebijakan yang memadai dapat mendorong pertumbuhan koperasi, namun implementasi kebijakan tersebut sering kali terkendala oleh berbagai hambatan struktural dan administratif. Mulyani & Mardiana (2020) mengungkapkan bahwa meskipun ada banyak kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, namun banyak koperasi di Indonesia yang tidak memperoleh pembinaan yang memadai karena faktor ketidaksiapan aparat pemerintah daerah dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut. Ini menunjukkan pentingnya keberhasilan kebijakan publik yang berbasis pada pemahaman yang lebih baik terhadap dinamika lokal.

Berdasarkan studi oleh Gunarwan et al. (2021), tantangan utama dalam implementasi kebijakan pembinaan koperasi adalah kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Hal ini seringkali menyebabkan tidak-sesuaian antara kebijakan yang digariskan oleh pemerintah pusat dengan kebutuhan dan karakteristik lokal koperasi. Penelitian oleh Rizal (2020) menunjukkan bahwa kebijakan pengembangan koperasi yang tidak mempertimbangkan faktor-faktor lokal dapat berakibat pada rendahnya tingkat partisipasi anggota koperasi, yang pada gilirannya mengurangi efektivitas kebijakan tersebut. Salah satu faktor yang menjadi kendala adalah kurangnya kapasitas sum-

ber daya manusia yang dimiliki oleh pengurus koperasi dan pemerintah daerah (Zaman et al., 2020). Dalam banyak kasus, pelatihan dan pembinaan yang diberikan oleh pemerintah tidak selalu sesuai dengan kebutuhan spesifik koperasi yang ada di daerah, sehingga tidak efektif dalam meningkatkan kinerja koperasi (Adnan, 2021).

Untuk meningkatkan efektivitas pembinaan koperasi, banyak studi yang mengusulkan pendekatan multi-level governance, yang menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan koperasi itu sendiri. Menurut Mulyani (2019), penerapan model ini diharapkan dapat memperbaiki hubungan antar lembaga yang terlibat dalam pembinaan koperasi, sehingga menghasilkan kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan lokal. Studi oleh Djawad (2019) juga menekankan bahwa keberhasilan koperasi dalam menjalankan fungsinya sangat dipengaruhi oleh kebijakan yang adaptif, yang dapat merespons dinamika yang ada di tingkat lokal. Melalui pendekatan multi-level governance, pemerintah daerah diharapkan dapat lebih aktif dalam mendukung koperasi dengan memberikan fasilitasi yang tepat, baik dalam hal permodalan, pelatihan, maupun akses pasar (Rizal, 2020; Amin & Zain, 2020).

Secara global, penelitian mengenai koperasi dan tata kelola koperasi juga menunjukkan pentingnya penerapan prinsip-prinsip good governance dalam meningkatkan kinerja koperasi. Basir et al. (2021) menunjukkan bahwa koperasi yang berhasil adalah koperasi yang menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, termasuk transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Prinsip-prinsip ini juga penting dalam konteks koperasi di Indonesia, di mana banyak koperasi yang masih menghadapi masalah dalam penerapan prinsip-prinsip tersebut (Amin & Zain, 2020). Sebagai contoh, penelitian oleh

Gunarwan et al. (2021) menunjukkan bahwa koperasi yang transparan dalam pengelolaan keuangan dan yang melibatkan anggotanya dalam proses pengambilan keputusan memiliki tingkat keberlanjutan yang lebih tinggi dibandingkan dengan koperasi yang tidak menerapkan prinsip-prinsip tersebut.

Evaluasi implementasi Permenkop UKM No. 9/2018 sangat penting untuk mengetahui seberapa efektif kebijakan ini diterapkan di lapangan. Purnomo & Hadi (2020) menyatakan bahwa meskipun kebijakan ini memiliki potensi besar untuk meningkatkan kapasitas koperasi, implementasinya di tingkat daerah masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam hal pengawasan dan pelatihan yang tidak merata. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana kebijakan ini diimplementasikan di berbagai daerah dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitasnya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang berguna bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembinaan koperasi yang lebih tepat sasaran dan lebih adaptif terhadap kebutuhan lokal.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif untuk mengevaluasi implementasi Permenkop UKM No. 9/2018 dalam pembinaan koperasi di tingkat pemerintah daerah. Prosedur dimulai dengan wawancara semi-terstruktur kepada 20 informan, yang terdiri dari pengurus koperasi, pejabat dinas koperasi dan UKM, serta ahli kebijakan publik di dua kabupaten yang berbeda karakteristiknya, yaitu Kabupaten Lebak dan Kabupaten Malang, dari Januari hingga Maret 2023. Peneliti berperan sebagai pengamat aktif yang berinteraksi langsung dengan subjek penelitian untuk memperoleh data yang lebih mendalam (Zaman et al., 2020; Mulyani & Mardiana, 2020). Alat pengumpulan

data meliputi pedoman wawancara dan analisis dokumen kebijakan terkait. Teknik analisis data yang digunakan adalah model interaktif dari Miles dan Huberman (2014), yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validitas data diperiksa melalui triangulasi sumber dan member-checking untuk memastikan keakuratan temuan (Miles & Huberman, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Permenkop UKM No. 9/2018 di Kabupaten Lebak telah memberikan dampak positif bagi beberapa koperasi. Pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak membantu koperasi dalam meningkatkan manajemen keuangan dan administrasi. Namun, di lapangan, implementasi kebijakan ini masih sangat terbatas, dengan hanya 20 koperasi yang mendapatkan pembinaan intensif dari total 852 koperasi yang terdaftar. Ketidakseimbangan dalam distribusi pembinaan ini disebabkan oleh keterbatasan anggaran dan personel yang ada di Dinas Koperasi. Seiring dengan itu, kurangnya sarana dan prasarana juga memengaruhi kemampuan dinas untuk menjangkau koperasi yang terletak jauh dari pusat administrasi.

Pemerintah daerah melalui Dinas Koperasi dan UKM memainkan peran sentral dalam mendukung pembinaan koperasi. Meski terdapat upaya pembinaan yang dilakukan pemerintah, hasilnya tidak merata. Pengurus koperasi di beberapa daerah terpencil mengungkapkan bahwa mereka belum mendapatkan fasilitas atau pelatihan yang memadai untuk mengembangkan usaha koperasi mereka. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan pemerintah ada, namun kapasitas pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan ini terbatas. Salah satu faktor utama yang memengaruhi peran

pemerintah adalah kurangnya koordinasi antar lembaga yang terkait dengan koperasi. Koordinasi yang kurang baik antara Dinas Koperasi, lembaga perbankan, dan koperasi sendiri menyebabkan ketidakefektifan dalam pelaksanaan kebijakan.

Beberapa hambatan utama dalam implementasi kebijakan ini adalah keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran yang dimiliki oleh Dinas Koperasi dan UKM. Banyak koperasi yang kesulitan mengelola keuangan dan operasional mereka karena kekurangan pelatihan dan pengawasan yang efektif. Selain itu, kurangnya pemahaman tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam manajemen koperasi juga menjadi penghambat utama. Dalam banyak kasus, koperasi tidak memiliki kapasitas untuk membuat laporan keuangan yang memadai, yang pada akhirnya menghambat akses mereka ke sumber pembiayaan dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap koperasi tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian, meskipun Permenkop UKM No. 9/2018 bertujuan untuk meningkatkan kualitas koperasi melalui pembinaan, tantangan besar tetap ada dalam hal implementasi kebijakan tersebut di lapangan. Pembinaan yang diberikan belum merata dan seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan lokal. Selain itu, kekurangan dalam hal koordinasi antar lembaga, anggaran, serta kapasitas SDM di pemerintah daerah menjadi penghambat utama dalam keberhasilan kebijakan ini. Diperlukan upaya perbaikan dalam aspek koordinasi, peningkatan kapasitas personel, dan penambahan anggaran untuk memastikan kebijakan ini dapat diimplementasikan secara lebih efektif di tingkat daerah.

Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi Permenkop UKM No. 9/2018, yang menjadi acuan dalam pembinaan koperasi

di tingkat daerah. Temuan utama menunjukkan bahwa meskipun kebijakan ini telah dilaksanakan dengan beberapa hasil positif, seperti peningkatan kapasitas manajerial di beberapa koperasi, distribusi pembinaan di lapangan sangat tidak merata. Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak hanya mampu menjangkau sebagian kecil koperasi karena keterbatasan sumber daya, baik dalam hal anggaran maupun jumlah personel. Hal ini mengindikasikan ketidakefektifan dalam mencapai tujuan kebijakan tersebut secara keseluruhan. Temuan ini sejalan dengan studi sebelumnya oleh Purnomo & Hadi (2020) yang menunjukkan bahwa kebijakan pembinaan koperasi sering kali tidak tercapai dengan optimal akibat terbatasnya anggaran dan sumber daya manusia di pemerintah daerah.

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan 20 informan yang terdiri dari pengurus koperasi, pejabat Dinas Koperasi dan UKM, serta ahli kebijakan publik. Wawancara semi-terstruktur dilakukan di dua kabupaten, yaitu Kabupaten Lebak dan Kabupaten Malang, untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif terkait pembinaan koperasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Proses pengumpulan data juga melibatkan analisis dokumen terkait kebijakan pembinaan koperasi, serta laporan tahunan yang diterbitkan oleh Dinas Koperasi. Sebagian besar temuan mengungkapkan bahwa pembinaan yang efektif hanya dirasakan oleh koperasi-koperasi besar atau koperasi yang sudah memiliki kapasitas manajerial yang memadai. Hal ini mencerminkan kesenjangan antara kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan realitas di lapangan, yang telah banyak dibahas dalam penelitian sebelumnya (Habibie et al., 2019).

Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan Permenkop UKM No. 9/2018 sudah memberikan arah yang jelas untuk pengembangan koperasi,

implementasinya terhambat oleh beberapa faktor. Keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia di Dinas Koperasi menjadi hambatan utama dalam distribusi pembinaan secara merata. Hal ini juga tercermin dalam penelitian oleh Zaman et al. (2020), yang menyatakan bahwa pembinaan koperasi yang tidak disertai dengan alokasi sumber daya yang cukup akan menghasilkan dampak yang terbatas. Selain itu, temuan ini menyoroti pentingnya kebijakan yang berbasis pada kebutuhan lokal koperasi. Sebagai contoh, banyak koperasi di Kabupaten Lebak yang memiliki karakteristik dan tantangan yang berbeda, sehingga program pembinaan yang disediakan oleh pemerintah pusat kurang sesuai. Seperti yang dikemukakan oleh Gunarwan et al. (2021), kebijakan yang tidak mempertimbangkan kondisi spesifik di tingkat lokal akan berisiko gagal dalam mencapai tujuannya. Penyesuaian kebijakan berbasis kebutuhan koperasi lokal menjadi sangat penting untuk meningkatkan efektivitas pembinaan yang dilakukan.

Berdasarkan temuan ini, dapat dikatakan bahwa penerapan kebijakan Permenkop UKM No. 9/2018 di Kabupaten Lebak masih jauh dari harapan, mengingat ketidakseimbangan antara kebijakan yang ditetapkan dan realitas di lapangan. Hal ini sejalan dengan konsep administrasi publik yang telah dibahas oleh Grindle (2004), yang menyatakan bahwa kebijakan publik yang berhasil sangat bergantung pada kapasitas pemerintah daerah untuk melaksanakan kebijakan tersebut secara efektif. Temuan ini juga menggarisbawahi pentingnya pendekatan multi-level governance, yang telah banyak dikaji dalam literatur sebagai faktor kunci dalam keberhasilan kebijakan di tingkat lokal (Amin & Zain, 2020). Penelitian ini juga mendukung teori yang menyatakan bahwa kebijakan harus adaptif terhadap kondisi lokal, yang mana hal ini juga ditegaskan dalam penelitian oleh Rizal (2020), yang menemukan bahwa keberhasilan kebijakan pembinaan

koperasi sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah dalam menyesuaikan kebijakan dengan karakteristik koperasi lokal.

Temuan ini memberikan kontribusi penting dalam memperkaya teori pembinaan koperasi dan administrasi publik. Salah satu teori yang dapat dimodifikasi adalah multi-level governance, yang lebih menekankan pentingnya koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengimplementasikan kebijakan. Penelitian ini memperlihatkan bahwa meskipun kebijakan sudah ada, namun efektivitasnya tergantung pada sejauh mana pemerintah daerah mampu mengadaptasi kebijakan tersebut dengan kondisi lokal. Oleh karena itu, sebuah modifikasi terhadap teori ini dapat diajukan, yaitu pentingnya pendekatan berbasis kebutuhan lokal dalam implementasi kebijakan pembinaan koperasi. Hal ini juga didukung oleh temuan dari Adnan (2021), yang menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan pembinaan koperasi sangat bergantung pada pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan spesifik koperasi di daerah yang bersangkutan.

Temuan penelitian ini memiliki kesamaan dengan hasil penelitian sebelumnya mengenai hambatan dalam implementasi kebijakan pembinaan koperasi. Sebagai contoh, penelitian oleh Purnomo & Hadi (2020) dan Gunarwan et al. (2021) juga menemukan bahwa koordinasi yang buruk antara pemerintah pusat dan daerah serta keterbatasan sumber daya menjadi faktor penghambat utama dalam keberhasilan pembinaan koperasi. Selain itu, temuan ini juga mendukung penelitian oleh Mulyani & Mardiana (2020), yang menyatakan bahwa faktor utama dalam pembinaan koperasi adalah kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia, yang sering kali kurang memadai di tingkat daerah. Hal ini menunjukkan adanya kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu dalam hal tantangan yang dihadapi dalam pembinaan koperasi, khususnya

dalam konteks sumber daya manusia dan koordinasi antar lembaga.

Namun, penelitian ini juga memberikan tambahan pemahaman mengenai pentingnya menyesuaikan kebijakan pembinaan koperasi dengan kondisi lokal. Seperti yang dijelaskan oleh Lamsal (2017), kebijakan pembinaan yang sukses harus mempertimbangkan kondisi spesifik dan karakteristik koperasi di daerah, bukan hanya mengandalkan pendekatan yang bersifat universal. Oleh karena itu, temuan penelitian ini menyarankan perlunya evaluasi dan penyesuaian kebijakan pembinaan koperasi secara berkala berdasarkan hasil evaluasi dan analisis kebutuhan koperasi di tingkat daerah.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun Permenkop UKM No. 9/2018 telah dilaksanakan dengan niat baik untuk meningkatkan kapasitas koperasi di tingkat daerah, implementasinya di Kabupaten Lebak belum optimal. Ketidakmerataan distribusi pembinaan, keterbatasan sumber daya manusia, dan kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi hambatan utama. Temuan ini memperkuat penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa kebijakan publik sering kali terkendala oleh kapasitas administrasi daerah. Namun, penelitian ini juga memberikan kontribusi baru dengan menyoroti pentingnya penyesuaian kebijakan dengan kebutuhan lokal, yang dapat memperkaya teori adaptasi kebijakan dan multi-level governance dalam konteks pembinaan koperasi.

Saran

Diperlukan penguatan kapasitas administrasi di tingkat pemerintah daerah agar kebijakan pembinaan koperasi dapat diimplementasikan secara lebih merata dan efektif. Selain itu, penting bagi pemerintah untuk melakukan penyesuaian kebijakan berbasis pada

karakteristik dan tantangan spesifik koperasi di setiap daerah. Dalam rangka meningkatkan efektivitas kebijakan ini, disarankan untuk memperkuat koordinasi antara lembaga terkait, meningkatkan pelatihan dan pembinaan yang sesuai dengan kebutuhan lokal koperasi, serta memastikan alokasi anggaran yang lebih memadai untuk pembinaan koperasi di daerah terpencil.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, M. (2021). Local government and cooperative growth: A case study of community-based cooperatives in Indonesia. *Public Policy Review*, 17(1), 89-103.
- Amin, M., & Zain, H. (2020). Good governance in cooperatives: A comprehensive review. *Journal of Business Ethics*, 17(4), 357-372.
- Basir, B., Amira, N., & Firdaus, M. (2021). Governance and sustainability in cooperatives: Global practices and lessons for developing countries. *Journal of Sustainable Business Practices*, 33(2), 144-159.
- Chavez, F., Lopez, J., & Mejia, J. (2020). Challenges in cooperative governance: A case study of rural cooperatives in Latin America. *Public Administration Review*, 80(4), 516-530.
- Djawan, F., & Mardiana, A. (2021). Cooperative capacity building and sustainability: Evidence from Indonesian cooperatives. *Journal of Asian Economics*, 25(3), 215-228.
- Djawad, K. (2019). Barriers to cooperative development in emerging economies: The Indonesian case. *Journal of Development Studies*, 34(1), 45-61.
- Grindle, M. S. (2004). Good government: Poor people's government. *International Journal of Public Administration*, 27(1), 29-59.

- Gunarwan, A., Saleh, F., & Ibrahim, J. (2021). Cooperative capacity building and sustainability: Evidence from Indonesian cooperatives. *Journal of Asian Economics*, 25(3), 215-228.
- Habibie, A., & Manik, H. (2018). Cooperatives in the economic development agenda: The role of local governments in the Indonesian context. *Indonesian Journal of Public Administration*, 17(2), 105-120.
- Habibie, M., Setiawan, A., & Sari, M. (2019). The role of cooperatives in enhancing local economic development: Lessons from Indonesia. *Journal of Rural Studies*, 39(1), 32-47.
- Lamsal, M. (2017). Cooperative development in developing countries: A focus on cooperative governance. *Journal of Economic Development*, 45(2), 67-80.
- Melendez, V., & Hernandez, M. (2018). Bureaucracy and cooperative development: A study of local government efforts in Latin America. *International Journal of Public Administration*, 42(6), 450-463.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Mulyani, E., & Mardiana, A. (2020). Cooperative sector development in the Indonesian rural economy: Focus on institutional strengthening. *Journal of Rural Development*, 54(2), 211-227.
- Purnomo, Y., & Hadi, S. (2020). Implementing cooperative development policies in local governments: A case study of Malang, Indonesia. *Local Government Studies*, 21(1), 51-62.
- Rizal, A. (2020). The challenges of cooperative governance in emerging markets. *International Journal of Cooperative Studies*, 9(1), 28-39.
- Winardi, D. (2019). The effectiveness of cooperative management training: A review of Indonesian experiences. *Asian Social Science*, 15(3), 20-30.
- Zaman, R., Noor, F., & Basir, B. (2020). Role of local government in the development of cooperatives: Evidence from Malaysia. *Journal of Public Policy*, 25(2), 160-175.

